

KH. SAIFUDDIN ZUHRI: ULAMA CUM NEGARAWAN (Mengharmoniskan Paham Keagamaan dan Kebangsaan)

Winarto Eka Wahyudi

Universitas Islam Lamongan

Email: ekawahyudi1926@gmail.com

Abstract

The nationality and religion entity (Islam) today is happening friction. This phenomenon, increasingly confirms that as if religion and the State is very difficult to be an integrative entity. Islam as a religion feels criminalized even oppressed. However on the other hand, the government as the state organizers also feels the rebellion of religious groups. This ironic reality, increasingly tapered because it is ridden by political interests that claim to freedom of opinion in the realm of democratisation. Thus, through this paper the author will examine the view of a scholar who became a representation of Islamic scholarship, in his perspective of the right nationalism applied in a State, as well as not clashing with the ideology (read: Islam). Through a multi-perspective reading, this study will describe the builder elements constructing an entity called Nationalism. Thus, there will be anatomical anatomy which can be an inspiration for the development of a State supported by universal values in religion.

Keyword: Nationalism, ideology, Indonesia

Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki tiga tantangan yang dapat mengancam spirit nasionalisme. *Pertama*, tantangan dalam bidang ideologi dengan semakin ramainya kelompok-kelompok yang bercita-cita ingin menegakkan hukum Islam dengan menabrak ideologi Negara yang telah disepakati bersama. Pada konteks ini,

munculnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia dan Jamaah Islamiyah merupakan indikasi kuat bahwa nasionalisme kebangsaan dibidang ideologi Negara tengah mendapat ancaman (Abegebriel, dkk: 2004; Mun'im, 2014).

Kedua, tantangan di bidang politik yang dibuktikan dengan semakin merebaknya aksi main sandera antara pemerintah dan lembaga Negara. Kasus perseteruan antara KPK dan Polri, KPK dan DPR, DPR dan pemerintah, serta parade saling serang antar anggota dewan bahkan kian membuat benih-benih kecintaan pada negeri sulit dipupuk lagi (Setyarso, 2014; Haryadi, 2009).

Ketiga, tantangan di bidang ekonomi yang membuat Negara kaya seperti Indonesia masih menggantungkan roda perekonomian kepada bangsa lain. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi, pertambangan bahkan sebagian besar sahamnya dikuasai oleh asing. Nasionalisme Indonesia kian terpuruk manakala neoliberalisme dan kapitalisme seakan masih menjadi satu-satunya jalan mengeja perekonomian bangsa (Habibi, 2016; Hervey, 2009; Robison, 2012).

Inilah yang penulis kategorikan sebagai kolonialisme gaya baru, yang tak lagi menjadikan senjata dan perang

sebagai alat pertempuran. Namun, ideologi, politik dan ekonomi sebagai gelanggang peperangan. Karena ketidaksiapan sumber daya manusia, kini Indonesia seakan terengah-engah menghadapi ancaman multidimensi tersebut.

Pada paper ini, penulis akan membedakan untuk selanjutnya mengurai jalan buntu ancaman nasionalisme bangsa Indonesia di bidang ideologi, yang berpotensi meluluhlantakkan Pancasila dan NKRI yang selama ini teruji sebagai *common platform* pemersatu Indonesia. Membedah konsep nasionalisme sebagai usaha mengurai ancaman ideologi, kian mendapatkan relevansinya karena pilar-pilar kebangsaan yang saat ini seakan runtuh akibat gesekan-gesekan primordial yang kian mengerikan. Setiap individu dan kelompok saling meneriakkan kebenarannya di ranah publik. Monopoli kebenaran ini pada gilirannya menyeret konflik antar sesama anak negeri. Kafir-mukmin, pribumi-non pribumi, asing-aseng menjadi diksi yang tengah menjadi *trending topic*, sehingga turut mendongkrak spirit disintegrasi antar elemen bangsa. Realitas inilah yang menyebabkan saat ini diskursus tentang semangat cinta tanah air perlu mendapatkan perhatian serius.

Melepuhnya kohesi sosial ini, diperparah dengan munculnya sekelompok oknum yang mengusik keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ironisnya, kelompok-kelompok tersebut jamak mengusung ideologi dan simbol-simbol agama (Islam) sebagai legitimasi gerakannya. Fenomena miris inilah yang menjadikan spirit nasionalisme menemukan momentumnya. Penulis pada kesempatan ini, akan mengungkap pemikiran KH. Saifuddin Zuhri tentang kecintaannya terhadap Negara dan

seperti apa fitur-fitur yang turut mengkonstruksi bangunan nasionalisme sang Menteri Agama era Soekarno ini.

Eksemplar Pemikiran Nasionalisme KH. Saifuddin Zuhri

Saifuddin Zuhri merupakan putra yang terlahir di Tanah Banyumas pada tanggal 9 Oktober 1919. Pernikahan Saifuddin dengan ibu Solichah, membuatnya dikaruniai sepuluh putra-putri yang kelak turut aktif membangun negeri. Mereka adalah Dr. Fahmi Dja'far (yang beristrikan Dra. Maryam putri tokoh NU K.H. Ahmad Syaikh); Farida (bersuamikan Ir. Shalahuddin Wahid putra ketiga K.H. Wahid Hasyim –adik kandung Abdurrahman Wahid); Anisa, istri Dr. Solichul Hadi (mantan aktivis PMII); Aisyah, yang dipersunting Drs. Wisnu Hadi (pengusaha); Andang FN; Baehaqi, berpendidikan di Kairo dan Belanda yang menikah dengan Gitta (Gadis Belanda); Julia; Annie; Adib yang menikah dengan Yanti Ilyas (putri K.H.M. Ilyas); dan Lukman Hakim yang saat ini menjadi Menteri Agama RI meneruskan jejak sang ayah. (Zuhri, 1981)

Sebagai mantan Menteri Agama, Zuhri mempunyai pemahaman nasionalisme yang begitu *genuine*. Karena, konsepsinya tentang nasionalisme dibentuk melalui pemahaman yang saling terintegrasi, yakni Saifuddin sebagai seorang warga Negara asli Indonesia dan sebagai sosok yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam melalui pondok pesantren. Melalui pengalaman dan pengamalannya menjadi seorang rakyat biasa kemudian menjadi salah satu unsur dalam pemerintahan, menjadikan pemikirannya yang murni patut untuk dikontekstualisasikan pada masa kini. Adapun eksemplar pemikiran nasionalisme Kh Saifuddin Zuhri, yaitu:

1. Solidaritas Publik

Wajah solidaritas sebagai bentuk konkrit nasionalisme dalam konteks Indonesia dewasa ini, menunjukkan gestur yang muram. Apalagi pasca pemilihan presiden 2014 serta selama pemilihan gubernur DKI Jakarta sampai puncaknya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berkonsekuensi hukum pembubaran organisasi politik pengamcam kebhinekaan. Sayatan kebencian kian mengangah seiring semakin mudahnya akses media sosial. Hujatan kepada pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi makanan pokok dalam list menu informasi sehari-hari. Realitas ironis ini diakibatkan nihilnya solidaritas antar umat. Dalam konteks ini, Zuhri (1981: 121) sebagai salah satu pendiri bangsa pernah berpandangan bahwa:

“bangsa Indonesia (kecuali yang berjiwa budak) dalam segala versinya adalah nasionalis pengemban cita-cita nasionalisme. Kesadaran sebagai kesatuan sebangsa setanah air membangunkan semangat percaya diri sendiri untuk mempertahankan eksistensi sebagai satu ras, membina kerukunan makro nasional, mempertahankan daulat kemerdekaan sebagai satu bangsa lain, nasionalisme itu akan membakar semangat merebut kembali miliknya yang hilang, jika tidak bisa dengan jalan halus, rela menempuh jalan bertempur mengorbankan peran kemerdekaan”

Pendapat Saifuddin ini merupakan unsur-unsur nilai yang mampu mengkonstruksi bangunan solidaritas nasional yang oleh Emile Durkheim (2006, 23) diartikan sebagai sebuah hubungan yang mengikat dari dalam diri individu dalam masyarakat yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan (keyakinan) yang diakui bersama-sama. Sedangkan keyakinan kolektif bangsa Indonesia, telah disepakati melalui ideologi Negara, yakni Pancasila.

Sebagai sebuah *kalimatun sawa*, Pancasila merupakan media yang paling ideal untuk merekatkan berbagai macam elemen masyarakat Indonesia yang mempunyai keragaman luar biasa. Maka dari itu, sangat relevan jika Saifuddin pernah berpandangan bahwa nasionalisme Indonesia yang paling tepat adalah nasionalisme pancasila. Suatu bentuk nasionalisme yang yang menjunjung tinggi agama-agama di Indonesia, nasionalisme yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalisme berorientasi pada persatuan bangsa Indonesia, nasionalisme yang berlandaskan kerakyatan dengan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nasionalisme yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakter nasionalisme ini, merupakan manifestasi ideal dari *macro solidarity* yang dibangun berlandaskan pada pembagian peran dan fungsi antar elemen bangsa yang proporsional, sehingga antara satu dan yang lain mempunyai ketergantungan sebagai satu bangsa serta sekaligus tidak ada perasaan saling mengambil alih peran dan fungsi tersebut. Inilah yang oleh Durkheim dikategorikan sebagai solidaritas organik (Durkheim, 2006).

Selanjutnya, Durkheim melihat solidaritas sosial sebagai suatu gejala moral. Hal ini terutama dilihat dari ikatan kelompok desa. Adanya ketertiban sosial atau tertib sosial yang sedikit di kota dibandingkan dengan gangguan ketertiban di desa, menurut Durkheim disebabkan karena faktor pengikat di desa di tingkatan menjadi moralitas masyarakat. Fakta itu terutama ialah: kontrol sosial masyarakat dan stabilitas keluarga (Jones, 2009).

Nilai kesetiakawanan yang dimaksud di atas, menunjukkan pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, seklaigus diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Kesadaran kolektif yang melahirkan sikap solidaritas ini, juga pernah ditegaskan secara lebih rinci, sebagaimana yang pernah Zuhri tuliskan (1981, 70):

Memelihara kelestarian agama dan menjaga kemurnian ajaran-ajarannya menjadi hak tiap pemeluk agama. Ummat islampun tidak terkecuali untuk memperoleh hak tersebut. Sudah banyak diketahui bahwa perincian doktrin islam mengenai pelaksanaan iman ialah barang siapa berbuat untuk memelihara kelestarian daripada: 1) susbtansi agama, 2) keselamatan jiwa raga, 3) keselamatan harta-benda dan keamanannya, 4) keselamatan keluarga, 5) keselamatan akal pikiran, 6) keselamatan kehormatan diri. Usaha memelihara 6 perkara

tersebut di atas itu tidak harus dilakukan oleh tiap orang terhadap individunya masing-masing, tetapi oleh tidaptiap orang dalam usaha kolektif untuk keselamatan bersama. Di situlah fungsi dan peranan persatuan (*ukhuwah*) dan solidaritas (*tadlammun*).

Statemen Saifuddin di atas, menunjukkan secara lebih tegas bahwa elemen pembangun sikap solidaritas adalah semakin banyak faktor yang terkumpul sebagai landasan integrasi, maka makin tinggi solidaritas kelompok dalam masyarakat. Unsur pengikat yang membentuk solidaritas, jika ditelisik dari pendapat Saifuddi berakar dari: penghormatan antar pemeluk agama, persamaan bahasa, kesejahteraan (keadilan ekonomi), kerja sama antarkelompok masyarakat, pengalaman, tindakan dan kehidupan bersama.

Poin penting yang dapat diambil adalah, bahwa pola sosial yang dikembangkan oleh Saifuddin telah merepresentasikan sikap atau nilai-nilai nasionalisme yang cukup kuat, sekaligus sebagai modal dasar penguatan nasionalisme modern. Dalam konteks ini terlihat jelas, bahwa anatomi nasionalisme dengan mengambil nilai solidaritas sebagai salah satu unsurnya, tidak hanya memiliki kekuatan mengikat solidaritas ke dalam (*inward bonding solidarity*), yaitu di internal umat islam saja, namun juga memiliki kekuatan merangkul solidaritas keluar (*outward bridging solidarity*), semua elemen bangsa (Hilmy, 2014).

2. Islam sebagai Inspirasi *Nation Building*

Dewasa ini, Islam sengaja dibenturkan dengan kebangsaan. Sehingga, menimbulkan pemberontakan di berbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan perjuangan agama (*jihad*). Realitas yang terjadi di Irak, Suriah, Yaman, Mesir, Afganistan dan berbagai Negara Timur Tengah lainnya, telah memberikan bukti bahwa sensitivitas agama paling tepat digunakan sebagai media memporakporandakan sebuah Negara. Terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya, pada faktanya, dalam beberapa abad terakhir, Islam dengan konsep khilafahnya menjadi "musuh" bagi Negara yang menerapkan hukum atau perundang-undangan yang tidak didasari pada teks-teks keagamaan (baca: Islam). Maka, menjadi sangat tepat jika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna memotong mata rantai pertumpahan darah sesama saudara sebagaimana terjadi di Negara-negara Asia, sehingga tak terjadi juga di Indonesia.

Karena desain Islam versus kebangsaan inilah, maka menjadi relevan untuk menguak konsep nasionalisme dalam perspektif substantif ajaran Islam. Dalam konteks ini, Kiai Asal Jawa Tengah, Saifuddin, mendeskripsikan bahwa nasionalisme pada dasarnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, sehingga pada posisi ini rasa cinta kepada tanah air merupakan salah satu bentuk dari kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kaitannya dengan persaudaraan kebangsaan. Sehingga, anugerah nasionalisme - menurut Saifuddin- bukan sebuah konsep teoritis yang tinggi, berubah-ubah dan labil.

Nasionalisme merupakan pengejawentahan mental-psikis manusia yang didasarkan pada

kecintaan pada tanah kelahirannya. Sebagaimana yang di tulis dalam karyanya (Zuhri, 1981: 217) bahwa:

Nasionalisme adalah alami, tegasnya; sifat pembawaan manusia yang dilahirkan sebagai bekal mengarungi hidup atas qodrat dan iradat Allah Tuhan Maha Pencipta, manusia sejak lahir telah membawa nasionalisme, dan tidak bisa memilih macam nasionalisme apa yang dikehendaki. Menghendaki sesuatu nasionalisme itu sendiri sejak gugurba itu adalah satu kemustahilan.....nasionalisme alami secara fitrah berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Tanpa planning tanpa programming, tanpa menuntut tanpa memilih kita dilahirkan menjadi bangsa indonesia"

Statemen Saifuddin di atas, kian menegaskan bahwa sungguhpun konsep nasionalisme secara teoritis-konseptual terlahir dan ramai diperbincangkan pada permulaan abad ke-19, yang diintrodusir pertama kali oleh filsuf Jerman, Herder serta Uskup Perancis, Augustin de Barruel, (Tilaar, 2004) namun pada tataran alamiah-psikis, sebenarnya setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menjaga, merawat dan mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa. Pandangan Saifuddin ini, menempatkan nasionalisme bukan sebagai sebuah paham, namun kecenderungan psikis yang menjiwai segenap manusia.

Pendapat ini senada dengan apa yang dikonseptualisasikan oleh Ernest Renan, dalam pidatonya yang terkenal di Sorbonne University pada tahun 1882, yang menegaskan bahwa nasionalisme tidak bisa disamakan dengan kesatuan ras, agama atau faktor-faktor primordial lainnya. Menurut Renan, bahwa nasionalisme menolak kesatuan yang didasarkan pada persamaan kepentingan, baik keyakninan atau kesukuan sebagai dasar alamiah pembentuk *nation*. Dengan mengemukakan istilah teknis, Renan berpandangan bahwa solidaritas kesatuan tanpa bataslah yang menjiwai nasionalisme. Pada posisi ini, nasionalisme merupakan keadaan jiwa (*something spiritual*) yang diistilahkan oleh Renan sebagai *a nation is a soul, a spiritual principle*.

Pada tahapan ini, bisa dipahami bahwa nasionalisme bukanlah sebuah ideologi atau produk pemikiran yang dimonopoli oleh para pemikir Barat, namun konsep kecintaan kepada bangsa atau Negara merupakan panggilan jiwa yang bersifat alamiah, natural sebagai salah satu keniscayaan yang dimiliki oleh manusia, sebagaimana yang diistilahkan oleh Saifuddin sebagai *natural-instinctive* atau dalam bahasa Renan yang menyebutkan sebagai *spiritual principle*.

Maka menjadi relavan, jika kondisi jiwa ini dilandasi oleh spririt keagamaan, dalam konteks ini ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan, keadilan dan kemanusiaan secara umum. Eksistensi islam sebagai inspirasi nasionalisme menjadi sangat penting agar karakter nasionalis tidak termanifestasikan dengan culas dan kaku, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Saifuddin, bahwa *Chauvinis* merupakan bentuk nasionalisme yang salah dan menyalahi kodrat manusia, karena

menganggaphanya bangsanya saja yang lebih baik (*superior*) sehingga merasa perlu bertindak berlebihan dan menindas bangsa lain, konsekuensinya akan tidak menghargai bangsa lain atau menegasikan kelompok lain yang juga mencintai tanah airnya.

Lebih jauh lagi, Saifuddin berpandangan bahwa agama memegang posisi sentral dalam pembentukan nasionalisme dan demokrasi. Sebagaimana yang ia katakan bahwa:

“.....maka dengan lain perkataan dapat disimpulkan , bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu ciri nasionalisme Indonesia mestilah berlandaskan pada nilai-nilai rohani, tegasnya: islam. Nilai rohani atau agama itulah yang akan membentuk corak nasionalisme indonesia menjadi *sosio-nasionalisme* dan *sosio-demokrasi*.

Dinamakan demikian, karena baik nasionalisme maupun demokrasi yang kita cita-citakan ialah nasionalismenya *sosio* dan demokrasinya *sosio*, dus nasionalisme dan demokrasi adalah nasionalisme dan demokrasi yang bersifat kemaysrakatan, yang mengabdikan kepada masyarakat, yang melayani kepada kebutuhan rakyat. Perbuatan mengabdikan dan melayani jelas sekali, bersumber pada nurani yang mempunyai kekayaan rohani (agama). Tanpa kekayaan rohani, jiwa mengabdikan maupun semangat melayani tidak bakal tumbuh.dari nilai-nilai

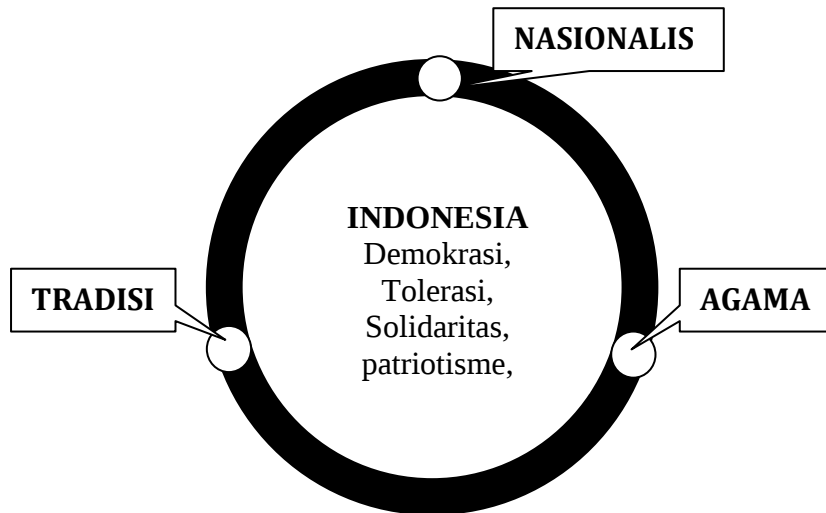
itu lahir pula apa yang ditentukan oleh istilah perikemanusiaan” (Zuhri, 1981: 135).

Dengan pernyataan itulah Saifuddin menegaskan bahwa nasionalisme maupun demokrasi yang dianut bangsa Indoensia adalah nasionalisme yang berakar-urat dari karakter dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Hingga, perkembangan politik maupun ekonomi, menurutnya bukan untuk kepentingan kaum elit dan segelintir golongan tertentu, akan tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saifuddin menambahkan bahwa aksentuasi pengabdian dan pelayanan yang menjadi dasar nasionalisme Indonesia haruslah bersumber dari kekayaan nilai-nilai rohani (agama) yang telah menjadi aset/ potensi besar penduduk Indonesia (Zuhri, 1981).

Pandangan Saifuddin tentang konsep nasionalisme ini menghasilkan kesimpulan bahwa ia mampu mengkonstruksi paham kebangsaan yang berangkat dari ajaran agama (Islam). Saifuddin meyakini bahwa sampai saat ini agama menjadi

faktor pokok yang mampu mengintegrasikan bangsa sekaligus menjadi *supra identity*, yaitu sebagai basis solidaritas sosial yang kuat.

Lebih jauh lagi, kajian ini menemukan bahwa Saifuddin mempunyai pandangan yang *genuine* Indonesia tentang konsepsinya terhadap nasionalisme. Corak nasionalisme yang diperjuangkan oleh Saifuddin lebih pada jenis sosio-nasionalisme. Yakni, bahwa eksistensi agama mampu dijadikan sebagai unsur perekat atas kesadaran kolektif semua elemen masyarakat terhadap terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia. Islam, dalam hal ini sesuai dengan pengalaman Indonesia menjadi semacam kekuatan pendorong munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sehingga, kesimpulan penting yang dapat dicatat dalam konteks ini bahwa agama (Islam) secara *inherently* memang menjadi unsur krusial terbentuknya Negara bangsa (*nation-state*), tentunya hal ini tak lepas dari paradigma yang digunakan dalam memahami ajaran agama (Islam).



Gambar Anatomi Nasionalisme KH. Saifuddin Zuhri

Pemahaman nasionalisme dalam perspektif islam inilah, maka KH. Hasyim Asy'ari –yang merupakan tutor ideologi Saifuddin Zuhri- mengintrodusir slogan *hubbul watan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman) yang belakangan

dijadikan sebagai embrio lahirkan tentara tanah air (Hizbul Wathan) yang dibidani oleh kalangan pesantren. Lahirnya konsep Negara-bangsa dari rahim komunitas pesantren yang menjadi lingkungan akrab Saifuddin ini, juga ditengarai akibat indoktrinasi yang cukup kuat tentang konsep nasionalisme yang dikembangkan di institusi keagamaan ini. Maka tak heran, konsep nasionalisme yang dikembangkan oleh Saifuddin melalui pendidikan di pesantren, mampu mengkontekstualisasikan diri dengan perkembangan bangsa Indonesia, sebuah konsep nasionalisme yang merangkul-semua (*all encompassing concept*) dan dengan sendirinya menolak “nasionalisme-primordial” yang belakangan direpresentasikan oleh gerakan islam transnasional (Hilmy, 2014).

Lebih lanjut, gagasan kaum pesantren yang cukup canggih adalah konsep *trilogy ukhuwah* yang terlahir dari kiai *par-exellent* yakni KH Ahmad Shidiq. Kiai asal jember ini menggagas sebuah tiga pola interaktif yang

belakangan dijadikan *trademark* kalangan pesantren dalam menguatkan semangat nasionalisme kontemporer. Ketiga bentuk sosialisasi itu antara lain; 1) *Ukhuwah Islamiyah* ;yakni persaudaraan sesama kaum muslimin, 2) *Ukhuwah Wathaniyah* : merupakan norma-norma hubungan antar sesama warga Negara yang tergabung dalam NKRI, dan yang 3) adalah *ukhuwah insaniyah*: adalah persaudaraan atas dasar kemanusiaan yang terlepas dari latar belakang agama, suku, bangsa, adat dan lain sebagainya.

3. Kebudayaan sebagai *Buffer Zone* Identitas Nasionalisme

Salah satu tiang penyangga nasionalisme adalah kesenian, atau dalam arti yang lebih luas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kebudayaan. Dalam diskursus nasionalisme kebudayaan menjadi entitas penting, karena menyangkut identitas nasional. Tilaar (2005, 205) dengan mengutip Charles Taylor pernah mengemukakan bahwa manusia yang berkembang tanpa

identitas adalah manusia yang kehilangan pedoman.

Tilaar mengemukakan bahwa identitas nasional merupakan pergeseran istilah yang sebelumnya lebih dikenal dengan watak nasional, atau kesadaran nasional. Ketiga istilah ini, mempunyai satu kesatuan makna yang memberikan kesan bahwa nasionalisme mempunyai coraknya tersendiri yang khas.

Identitas nasional dimaknai Antony Smith (1991: 9) sebagai *sense of political community, history, territory, patria, citizenship, common values and traditions*. He argues that *'nations must have a measure of common culture and a civic ideology, a set of common understandings and aspirations, sentiments and ideas, that bind the population together in their homeland'*. Adding that, *the agencies of popular socialization-primarily the public system of education and the mass media – have been handed the task of ensuring a common public mass culture*.

Pandangan Smith di atas menegaskan bahwa identitas nasional, dapat direalisasikan melalui produk kebudayaan, agar dapat diukur sejauh mana bangsa tersebut memiliki peradabannya yang tinggi, sekaligus sebuah Negara memerlukan ideologi Negara yang mampu mengikat beragam elemen masyarakat yang heterogen menjadi satu kesatuan aspirasi.

Dalam konteks ideologi Negara yang menjadi unsur penting identitas nasional, maka Saifuddin mempunyai pandangan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun produk kebudayaan yang menjadi identitas nasionalisme merupakan buah karya cipta manusia agar karakter-kepribadian seseorang tidak kaku dan radikal. Hal ini penting

dipahami karena radikalisme sulit menembus tembok-tembok kebudayaan. Urgensi kesenian, Saifuddin berpandangan bahwa:

“Semua ini sekedar menginsyafi perlunya suatu kehidupan rileks, sebagai apresiasi atau pengisyafan penghargaan terhadap rasa seni di kalangan santri. Kiai sering menginsyafkan kami semua, bahwa rasa seni amat penting, agar kita terdidik oleh perasaan halus, salah satu faktor penting ketika kita hidup di tengah masyarakat. Orang yang tak menghargai rasa seni akan menjadi orang-orang yang serba kaku, bahkan bisa menimbulkan sikap kasar dalam tindak-tanduknya” (Zuhri, 2011, 737).

Catatan penting dalam ungkapan Saifuddin menegaskan bahwa tradisi merupakan modalitas utama dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan tradisi dan kesenian pula, masyarakat –dalam pandangan Smith– akan memiliki pemahaman, aspirasi dan gagasan kolektif (*common understanding, sentiment and idea*) sebagai sebuah satu komunitas. Menurut Saifuddin, dengan senilah manusia dididik menjadi seseorang yang berwatak lemah lembut sebagai karakter dasar masyarakat. Tradisi merupakan warisan adi luhung yang di transmisikan dari generasi ke generasi secara langsung mampu menjadi dinding pemisah antara ideologi kebangsaan dengan ideologi radikal.

Positioning tradisi sebagai daun talas fundamentalisme agama, pada konteks saat ini dapat dipahami

dengan memperbanyak produksi informasi berbasis tradisi dan kebudayaan sebagai usaha untuk melakukan *counter* terhadap paham dan ideologisasi radikalisme di media online, terlebih media sosial. Memperkuat tradisi pada media populis saat ini, sangat relevan untuk menumbuhkan kecintaan atas bangsa dan negaranya. Strategi ini, dalam rangka mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman, di dalam media budaya dan teknologi sebagai produk manusia. Sehingga, entitas kebudayaan dalam konteks ini, merupakan aset bangsa yang menunjukkan jati diri nasional, karakter yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan kebudayaan dan kepribadian yang unggul. Dalam konteks peneguhan jati diri kebudayaan sebagai identitas nasional ini, Zuhri (2011: 161) pernah mengungkapkan bahwa:

“Aku bukan guru Bahasa Belanda, bahasa Belandaku cuma sepotong-sepotong, karena itu aku belajar bahasa Belanda sedikit-sedikit kepada rekan guru bahasa ini. Aku adalah guru agama islam pada *Islamitisch Westerse School*. Karena itu aku mesti memakai peci. Ada juga temanku sesama guru yang menganjurkan aku tak memakai peci, tetapi, ah, peduli amat. Biar aku dipandang janggal oleh satu dua orang, asal masyarakatku tak memandang demikian.”

Argumentasi Saifuddin di atas, diafirmasi oleh pendapat Ghia Nodia (1992: 14), yang menganalogikan bahwa spirit nasionalisme ibarat satu

koin yang mempunyai dua sisi. Sisi pertama adalah politik, dan sisi lainnya adalah etnik. Tidak ada nasionalisme tanpa muatan politis, namun secara substantif, entitasnya tak lain kecuali sentimen etnik. Hubungan antar elemen ini ibarat jiwa politik yang mengambil etnisitas sebagai jasadnya. Nasionalisme yang muncul dalam pemikiran Saifuddin di atas, merupakan perpaduan sentimen etnisitas sebagai orang Indonesia dan simpati politik sebagai bangsa terjajah yang kemudian beramal gamasi dengan semangat keagamaan (baca: Islam).

4. Demokrasi sebagai Keadaban Berbangsa

Demokrasi merupakan jalan paling masuk akal untuk menciptakan keadilan sosial lebih baik. Dengan demokrasi, sebuah negara mampu menciptakan keseimbangan dan kesamaan di mata hukum. Karena, dengan demokrasi seseorang bisa menyuarakan aspirasinya dengan jaminan konstitusi. Namun dalam implementasinya, demokrasi melahirkan anak kandung bernama kebebasan. Hal ini sangat masuk akal karena demokrasi lahir dari rahim madzhab liberalisme.

Fakta historis menunjukkan bahwa konsep tentang demokrasi berawal dari negara-negara Barat, khususnya Inggris, Amerika dan Prancis. Sebagai anak kandung dari modernism, akar ideologi demokrasi Barat adalah liberalisme, Ali Mudhafir (2008: 47) mengidentifikasi bahwa liberalisme merupakan aliran filsafat yang mempertahankan kebebasan perseorangan yang mempunyai potensi orientasi kekuasaan secara mutlak. Kebebasan ini mencakup bidang agama, ekonomi dan politik. Liberalisme pada gilirannya menjadi moralitas tertinggi bagi kemajuan bersama, yaitu kebebasan individu

dalam kehidupan bernegara. Yang kemudian melahirkan nasionalisme dan demokrasi dalam kehidupan politik. Corak ideologi ini pada akhirnya melahirkan tatanan kapitalis yang dikenal dengan semboyan *Laisser Faire, laisser passer le monde va de lui-meme* (produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat akan menyelenggarakan harmoni dunia) baik di bidang ekonomi, dan kebebasan beragama dengan sekularisme sebagai konsekuensi logisnya.

Namun, konsep historis demokrasi ini berbeda dengan model demokrasi yang dipahami oleh Saifuddin sebagai aktualisasi dalam mengembangkan keadaban berbangsa. Ia mengenalkan demokrasi kemasyarakatan yang disitilarkannya sebagai sosio-demokrasi. Dalam karyanya yang telah menjadi klasik, ia berpandangan bahwa:

“..maka dengan lain perkataan dapat disimpulkan, bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu ciri nasionalisme Indonesia mestilah berlandaskan pada nilai-nilai rohani, tegasnya: islam. Nilai rohani atau agama itulah yang akan membentuk corak nasionalisme Indonesia menjadi *sosio-nasionalisme* dan *sosio-demokrasi*.

Dinamakan demikian, karena baik nasionalisme maupun demokrasi yang kita cita-citakan ialah nasionalismenya *sosio* dan demokrasiya *sosio*, dus nasionalisme dan demokrasi adalah nasionalisme dan

demokrasi yang bersifat kemasyarakatan, yang mengabdikan kepada masyarakat, yang melayani kepada kebutuhan rakyat” (Zuhri, 1981: 159).

Pandangan Saifuddin di atas, tentu bertolak belakang dengan konsep demokrasi yang berlaku di Barat. Karakter demokrasi yang mengarusutamakan *public interest* serta sentiment religius. Yudi Latif (2011: 383) mengistilahkan, tipologi demokrasi ini disebut sebagai demokrasi pancasila. Yakni sebuah sistem politik yang mengapresiasi kebebasan individu tidak secara mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Asas kepentingan rakyat yang menjiwai demokrasi di atas, berkonsekuensi logis pada aspek-aspek yang menjadi faktor penentu jaminan kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara lebih luas. Sehingga, hak-hak individu dan kolektif sebuah kelompok harus kompatibel dengan kemakmuran sosial. Pemaknaan ini secara konseptual berdampak pada ternegasikannya upaya-upaya yang mengaspirasikan sekaligus mengapresiasi tindakan-tindakan yang mengancam keamanan dan kehormatan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Hal ini mengingatkan, tindakan-tindakan intoleransi seiring sejalan bertambah subur pasca kran demokrasi dibuka semenjak era reformasi bergulir. Kejahatan ekonomi yang berwujud kapitalisme dengan mendaku pada undang-undang Negara, tentu berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Realitas ini dibuktikan dengan dikuasainya lahan-lahan ekonomi rakyat oleh para pemilik modal. Potret ini, justru

menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan pandangan para pendiri bangsa, dalam konteks ini bertolak belakang dengan konsep demokrasi Saifuddin.

Di sisi lain, menjamur dan menjalarnya kelompok-kelompok Islam radikal –yang menjadikan kekerasan sebagai media dakwahnya– turut mempersuram wajah demokrasi di Indonesia. Karakter golongan islam jenis ini, selain lazim menggunakan kekerasan baik verbal, literal dan digital juga berpotensi meruntuhkan sendi-sendi kedaulatan bangsa dengan berupaya membenturkan islam dan Negara.

Tores mengkategorikan bahwa demokrasi memiliki dua wajah, yakni *formal democracy* dan *substantive democracy*. Secara formal, Negara telah menjamin di dalam konstitusi, tepatnya pada Undang-Undang 1945 pasal 28E yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan serta memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pada poin selanjutnya, Negara secara formil juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dan, yang menjadi kuda tunggang dalam kelompok-kelompok ekstrimis dan radikal adalah pasal yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Fenomena menjamurnya gerakan-gerakan yang mengeksploitasi ekonomi dan ideologi secara jujur berangkat dari jaminan kebebasan ini. Namun, secara konseptual kebebasan ini terikat pada kewajiban-kewajiban

yang mengharuskan penjagaan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari implementasi sosio-demokrasi yang diintrodusir oleh Saifuddin.

Sosio-demokrasi ini, relevan terhadap ketogorisasi Tores tentang demokrasi selanjutnya, yakni demokrasi substantive, yaitu bagaimana sistem demokrasi ini dijalankan.

Simpulan

Pemaknaan Saifuddin tentang Nasionalisme merupakan gagasan yang eklektik, genuine sehingga sangat tepat dijadikan sebagai landasan berfikir tentang bagaimana memaknai sentiment kebangsaan. Kecintaannya terhadap tanah air, tidak menjadikannya sebagai sosok yang eksklusif, individual, chauvinis yang justru menabrak entitas keragaman yang lain. hal ini dikarenakan corak nasionalismenya dihasilkan melalui persenyawaan yang cerdas antara tradisi dengan keagamaan. Sehingga menciptakan karakter nasionalisme yang artikulatif terhadap lokus Indonesia yang multikultural, namun mempunyai agama dominan, yakni Islam.

Eksistensi tradisi dan islam menjadi bagian penting dalam bangunan nasionalisme yang dimiliki oleh Saifuddin. Pengalaman Indonesia menunjukkan, bahwa kemajemukan etnisitas beserta potensi divisif dan konfliknya dengan segera dapat diminimalisir oleh faktor Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk. Dalam posisi ini, Islam menjadi *supra-identity* yang mampu menumbuhkan identitas nasional sekaligus memembuahkan kesetiaan etnisitas sebagai identitas nasional. Dengan demikian, kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak hanya menyatukan berbagai

kelompok etnis dalam pandangan keagamaan, tetapi juga dalam aspek-aspek penting yang bahkan menjadi dasar nasionalisme-khususnya bahasa. Berkat Islam, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, menjadi *lingua franca* berbagai kelompok etnis di Indonesia (Mehden, 1963).

Kesetiaan Saifuddin pada Islam, pada gilirannya memperkuat kesadarannya untuk memperjuangkan kemerdekaan sekaligus menjadi juru bicara nasionalisme melalui karya-karyanya serta kebijakannya selama menjadi menteri agama. Inisiasi penerjemahan al-Quran kedalam bahasa Indonesia serta pendirian perguruan tinggi Islam (IAIN) diberbagai provinsi dengan menyematkan nama-nama para walisongo dan ulama daerah lain, menjadi prasasti sejarah bahwa ia mampu membawa Islam dan kebudayaan sebagai elemen dasar meramu tamansari keindonesiaan. Dalam pengertian ini, Islam berhasil menjadi *blessing in disguise* yang dimanfaatkan potensinya secara substantif dalam menumbuhkan spirit kebangsaan.

Dengan demikian, dalam kasus Indonesia, Islam menjadi unsur *genuine*, pendorong munculnya nasionalisme Indonesia. Dan pada saat yang sama, Islam juga mampu menjinakkan sentimen etnisitas untuk menumbuhkan loyalitas kepada entitas yang lebih tinggi, yakni kesedaran kolektif sebagai sebuah bangsa yang satu.

Konstruksi pemahaman nasionalisme Saifuddin ini, dalam hubungannya dengan etnisitas dan agama, pada faktanya bertolak belakang dengan tesis Fukuyama. Melalui karyanya, Fukuyama memang benar ketika menyatakan bahwa nasionalisme era awal (tepatnya proto-

nasionalisme) pada abad ke-16 di Eropa sangat kental dengan sentimen keagamaan, sehingga hanya menghasilkan fanatisme keagamaan dan perang agama. Misi kristenisasi (gospel) bangsa Eropa ke negara lain melalui imperialisme dan kolonialisme mengafirmasi realitas ini. Pendapat Fukuyama ini, juga mungkin benar dalam kaitannya dengan brutalitas nasionalisme Serbia beberapa tahun lalu.

Namun, dalam kasus Islam di Indonesia, justru sebaliknya. Dengan wajah yang lebih toleran dan ramah, Saifuddin mampu menjadi salah satu agen yang menunjukkan bahwa Islam Indonesia justru merangsang, menumbuhkan, dan berkontribusi positif dalam pertumbuhan nasionalisme. Bahkan pada akhirnya mampu menjadi pendulum utama dalam kemerdekaan Indonesia, sekaligus turut serta dalam merancang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai asas ideologi berbangsa.

Daftar Rujukan

- Abegebriel, M. dkk. 2004. *Negara Tuhan*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Anthony, D. S. 1991. *National Identity*, London: Penguin.
- Habibi, M. 2016. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Haryadi, R. 2009. *Chandra-Bibit: Membongkar Perseteruan KPK, POLRI dan Kejaksaan*, Jakarta: Hikmah.
- Hervey, D. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Yogyakarta: Resist Book.
- Hilmy, M. 2014. *Islam, Politik dan Demokrasi*, Surabaya: Imtiyaz.

- James M. Henselin. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: PT Gelora Aksara.
- Jones. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Mehden, FR. v d. 1963. *Religion and Nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia, the Philippines*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Mudhofir, A. *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat*, Jakarta: Liberti, 2008.
- Mun'im, DZ. 2014. *Runtuhnya Gerakan Subversi di Indonesia*. Jakarta: LTN PBNU.
- Nodia, G. 1992. "Nationalism and Democracy", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 3, No.4.
- Robison, R. 2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu.
- Setyarso, B. 2012. *KPK vs Polri: Mengungkap Fakta Mengejutkan yang belum Terekspos Media*. Jakarta: Noura Book.
- Susanto, PS. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Binacipta.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- _____. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zuhri, S. 2012. *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Yogyakarta: Lkis.
- _____. 1981. *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: PT Gunung Agung.
- _____. 1982. *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gunung Agung.